

Melawan Ketidakadilan Untuk Menghapus Kemiskinan Struktural

Oleh Merphin Panjaitan

Pendahuluan

Kemiskinan yang parah sedang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan ini terlihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak bagi ratusan juta orang. Dikhawatirkan, kemiskinan yang menyakitkan ini akan terus diderita oleh banyak orang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ungkapan sinis tentang hal itu berbunyi: “penyebab kemiskinan adalah kemiskinan itu sendiri”. Artinya, ratusan juta orang miskin pada generasi ini akan mewariskannya kepada keturunannya.

Indonesia mengalami krisis multidimensional yang dimulai dengan krisis moneter pada pertengahan 1997. Krisis ini mengakibatkan kaum miskin di Indonesia jumlahnya meningkat pesat dengan kemiskinan yang semakin parah. Krisis menimbulkan banyak pengangguran, dan pengangguran itu sendiri menambah banyaknya jumlah orang miskin, kondisi seperti ini membuat kita perlu menaruh perhatian besar untuk menghapus kemiskinan, atau paling tidak untuk menguranginya. Proses pengurangan kemiskinan ini harus dimulai dengan mencari akar persoalan yang menjadi penyebab utama dari kemiskinan kita ini, dan selanjutnya menyusun strategi untuk mengatasinya. Kemiskinan memang akan selalu ada, tetapi jumlahnya tidak jangan sampai besar, dan penderita kemiskinan tidak boleh tetap pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kemiskinan harus berpindah dari orang-orang yang mau belajar dan bekerja keras melawan kemiskinan itu sendiri.

Masalah kemiskinan melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun demikian, kaum miskin belum tentu menyadari kemiskinan yang mereka alami. Kesadaran akan kemiskinan baru terasa pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang mempunyai tingkat kehidupan ekonomi lebih tinggi.

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibanding dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan martabat atau harga diri.

Kaum miskin ada di mana-mana, di kota maupun di desa. Mereka umumnya berpendidikan rendah dan kekurangan modal. Emil Saim mengemukakan bahwa mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki ciri-ciri, antara lain: umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal, ataupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki sangat sedikit sehingga kemampuan mereka untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Sementara untuk memperoleh kredit perbankan, kaum miskin itu kerap sulit memenuhi persyaratannya. Mereka terpaksa berpaling pada “lintah darat”, yang

mau meminjamkan uang tapi memungut bunga tinggi. Tingkat pendidikan kaum miskin pada umumnya juga rendah, karena waktu mereka habis untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa waktu untuk belajar. Sedangkan anak-anak mereka umumnya juga tidak bisa menyelesaikan sekolah, karena harus membantu orangtua mencari tambahan penghasilan (Andre Bayo Ala, 1996).

Samuel P. Huntington (1994) menyatakan bahwa kaum miskin yang tinggal di pedesaan adalah petani dan buruh tani yang hidup pada tingkat subsistens dan di bawah subsistens. Termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang memiliki, menyewa, menggarap atas dasar perjanjian bagi hasil lahan-lahan yang hampir-hampir tidak mencukupi untuk menghidupi diri mereka sendiri beserta keluarga, atau mereka yang tidak mempunyai lahan dan hidupnya tergantung pada upah yang kecil yang mereka peroleh sebagai buruh. Di daerah perkotaan, golongan miskin adalah mereka yang berpendidikan atau berketerampilan rendah atau tidak berpendidikan dan tidak berketerampilan sama sekali, dengan upah yang rendah dan tanpa kemungkinan untuk mendapat kedudukan yang lebih baik.

Gavin Jones mengungkapkan jumlah orang miskin perkotaan di Pulau Jawa tetap banyak dan bahkan bertambah karena kelahiran dan migrasi orang-orang pedesaan yang miskin ke kota. Migrasi ini terjadi karena orang desa melihat peluang kerja di kota lebih besar. Terdapat perbedaan yang besar antara pendapatan di pedesaan dengan di perkotaan di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Menurut pandangan orang miskin desa, jaminan hidup di kota tampak lebih besar. Kesempatan memperoleh pekerjaan di kota lebih besar dari pada di desanya. Misgrasi orang miskin desa ke kota ikut menambah banyaknya jumlah orang yang miskin di kota. Ketimpangan ekonomi antara kota dan desa ternyata justru menambah persoalan kemiskinan di kota (Dorojatun Kuntjorojakti, 1994).

Kaum miskin berada pada posisi lemah dan sering dilecehkan. Mereka dengan mudahnya tergusur dari tanah atau dari tempat usaha mereka, tanpa kekuatan untuk membela diri. Perkampungan kumuh dengan mudahnya digusur agar lahannya dapat digunakan untuk pertokoan modern. Banyak petani yang harus merelakan tanah mereka dibeli dengan ganti rugi yang rendah, agar di atas tanah tersebut dapat dibangun lapangan golf, pabrik, atau perumahan mewah. Oleh karena kemiskinan mereka, kaum miskin tidak dapat membayar pengacara untuk membela kepentingan mereka, sementara pengadilan kerap kali mengalahkan mereka. Tidak heran jika kaum miskin terus menerus berada dalam posisi terancam dan tidak aman.

Di bidang politik, kaum miskin sering dijadikan penggembira dan pelengkap penderita. Maksudnya, mereka dijadikan “penggembira” ketika pemilu berlangsung dan “pelengkap penderita” setelah pemilu selesai. Sejak beberapa bulan sebelum pemilu, banyak partai politik memboyong kaum miskin ke berbagai lapangan terbuka untuk mengikuti acara-acara partai: mendapat sedikit hiburan dan banyak pidato. Pimpinan partai membuat kegiatan seperti ini sebagai sarana menanamkan kesetiaan kepada massa, sekaligus menunjukkan kepada pihak lain bahwa mereka punya banyak pengikut. Kaum miskin yang kurang hiburan agaknya menyukai acara ini. Sekali dalam lima tahun, kaum miskin menjadi “orang penting” bagi pemimpin partai. Sampai ke pelosok-pelosok desa, mereka didatangi dan dirayu, baik dengan kata-kata maupun dengan “santunan”. Selama waktu-waktu seperti itulah mereka menjadi “orang-orang yang terhormat”. Namun, segera setelah wakil-wakil rakyat yang terhormat dilantik, kaum miskin pun ditinggalkan. Mereka dilupakan, seolah tak pernah ada. Kalaupun sebagian dari kaum miskin itu ingin menemui wakil-wakil rakyat yang pada waktu kampanye sering datang mengunjungi mereka, para wakil rakyat ini telah menyediakan seribu satu alasan untuk menghindar. Apalagi kalau kedatangan

kaum miskin itu membawa permasalahan. Walaupun mereka dapat bertemu dan berdialog dengan wakil rakyat, tidak dijamin aspirasi mereka akan diperjuangkan.

Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural diakibatkan oleh berbagai sebab. Kurangnya modal, rendahnya pendidikan, kurangnya kesempatan kerja, dan berbagai penyebab lainnya, dapat mengakibatkan timbulnya kemiskinan. Penyebab kemiskinan itu, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri orang yang bersangkutan, merupakan kondisi yang mendorong orang tersebut menjadi miskin. Dengan demikian, interaksi dari berbagai kondisi tersebut dapat membuat kehidupan orang-orang miskin semakin tidak layak.

Sekaitan hal itu, negara dapat memperbaiki pelayanan kesehatan dan pendidikan, khususnya bagi kaum miskin. Negara dapat mempermudah kaum miskin untuk mendapatkan pinjaman modal sesuai dengan usaha dan pekerjaan mereka. Negara juga dapat memberikan bantuan pangan kepada kaum miskin yang kelaparan. Hampir semua kondisi yang kondusif untuk memberdayakan kaum miskin dapat dilaksanakan oleh negara. Negara memang tidak dapat memaksa orang malas menjadi rajin, tetapi paling tidak negara dapat mendorong orang miskin menjadi rajin, dengan memberi imbalan bagi kerajinan mereka.

Negara tidak bisa memaksa kaum miskin untuk rajin belajar, tetapi sebagian besar kaum miskin akan rajin belajar kalau mereka melihat kenyataan bahwa rajin belajar dapat membuat pendapatan dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Yang penting, fasilitas untuk belajar tersedia bagi mereka, sesuai dengan kemampuan dan keberadaan mereka. Dengan demikian, sesungguhnya banyak hal yang dapat dilakukan negara untuk memberdayakan kaum miskin. Persoalannya adalah bagaimana membuat negara mau melayani kaum miskin itu.

Siapa yang paling berpengaruh dalam proses penyelenggaraan negara, dialah yang akan diuntungkan oleh negara. Dalam kerangka pemikiran ini, saya sampai pada kesimpulan, bahwa kemiskinan hanya dapat diatasi kalau kaum miskin mempunyai pengaruh yang kuat dalam proses penyelenggaraan negara. Artinya, kenyataan bahwa segelintir elite politik yang bekerjasama dengan elite bisnis untuk secara sengaja menciptakan struktur kemasyarakatan dan kenegaraan yang menjauhkan kaum miskin dari berbagai sumberdaya ekonomi, politik, sosial, dan keamanan, itu harus dilawan.

Kemiskinan struktural di Indonesia mulai mendapat perhatian besar secara nasional di kalangan para sarjana ilmu-ilmu sosial dan juga di kalangan khalayak ramai setelah seminar HIPIS (Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial) yang diselenggarakan di Malang, November 1979. Dalam seminar tersebut, sosiolog Selo Soemardjan mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosialnya membuat masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Parsudi Suparlan ed., 1995).

Akhir-akhir ini pengakuan terhadap adanya kemiskinan struktural di Indonesia semakin kuat. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai kemiskinan struktural. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang meluas dan merajalela telah menciptakan kondisi sedemikian rupa, sehingga banyak orang menjadi miskin atau tetap miskin karena mereka tidak mendapatkan sumber daya yang semestinya

mereka dapatkan. Juga, karena struktur kemasyarakatan dan kenegaraan yang ada menghalangi mereka. Walaupun sekitar 50 persen tenaga kerja di Indonesia hidup dari pertanian, sebagai contoh, tetapi pinjaman yang diberikan kepada para petani terlalu kecil. Sementara, kaum pengusaha yang dekat dengan penguasa dapat dengan mudahnya memperoleh pinjaman dalam jumlah yang sangat besar. Petani yang rajin bekerja dari pagi hingga sore, dan kemudian menghasilkan panen yang berlimpah, tetap saja miskin karena harga jual gabahnya rendah. Kondisi seperti ini berulang terus dari tahun ke tahun, untuk hampir semua hasil panen. Pemerintah tidak mempunyai strategi yang cocok untuk meningkatkan pendapatan petani, sehingga banyak petani tetap miskin walaupun telah bekerja keras dan menghasilkan panen yang melimpah.

Pemerintah, dalam konteks ini, telah berlaku tidak adil, karena lebih membela konsumen beras daripada petani padi. Harga beras yang hampir sama dengan harga air mineral menunjukkan bagaimana pemerintah melecehkan kelompok-kelompok petani padi yang jumlahnya sangat banyak dan telah berprestasi itu. Pelecehan dan ketidakadilan seperti ini jelas harus dilawan oleh kaum tani itu sendiri. Kaum petani harus memperlihatkan kemarahan mereka, sampai pemerintah menyadari ketidakadilannya dan bersedia memperbaikinya.

Banyak kasus lepasnya tanah pertanian dari tangan petani penggarap disebabkan karena hak guna usaha (HGU) tanah garapan tersebut diberikan kepada pengusaha dari kota yang akan membangun lapangan golf, pemukiman mewah, atau daerah industri. Di perkotaan sering terjadi pasar-pasar kecil, yang tadinya sepi pembeli dan hanya ditempati oleh pedagang kecil, setelah ramai malah ditawarkan pemerintah daerah kepada pengusaha besar untuk diubah menjadi pertokoan modern. Sementara, pedagang kecil yang menempatnya tidak mampu lagi berdagang di sana. Pasar yang awalnya diramainya oleh pedagang kecil, tetapi setelah ramai pindah ke tangan pengusaha besar dan menengah. Pedagang kecil yang sudah mulai berkembang terpaksa pindah ke tempat lain dan harus memulai lagi dari bawah.

Dilindas oleh krisis multidimensional inilah akhirnya jumlah kaum miskin di Indonesia semakin banyak dengan penderitaan yang semakin berat. Tetapi, sampai sekarang kita tidak melihat kebijakan negara yang cukup berarti dalam memberdayakan kaum miskin. Yang terlihat justru kerjasama antara sesama elite politik dengan elite bisnis demi memperkaya diri mereka dan memperkuat posisi istimewa mereka sendiri. Banyak dari elite politik itu yang mendaki karier politik mereka dengan dukungan kaum miskin, tetapi segera setelah mereka berkuasa, yang paling cepat mereka lupakan justru kaum miskin itu sendiri.

Paparan di atas menggambarkan bahwa di Indonesia telah tercipta struktur ekonomi, politik dan sosial yang tidak adil, yang mengakibatkan sebagian warga masyarakat mengalami kemiskinan, yang semestinya tidak perlu terjadi. Kemiskinan ini disebut sebagai kemiskinan struktural yang terjadi akibat rendahnya partisipasi politik kaum miskin yang mengakibatkan rendahnya pengaruh kaum miskin terhadap pembuatan kebijakan negara.

Melawan ketidakadilan

John Friedman (1996) memalu genderang perang dengan menyatakan “kemiskinan merupakan suatu fenomena politik”. Dengan kata lain, kemiskinan berarti kurangnya kesempatan untuk mencapai kekuasaan. Seseorang tidak menjadi miskin bila memperoleh kesempatan. Persoalannya adalah

bagaimana kaum miskin dapat memperoleh kesempatan, kalau orang-orang yang mempunyai posisi istimewa secara politik justru menghalangi mereka?

Saya ingin melanjutkan pernyataan John Friedman ini, bahwa tindakan orang yang memiliki posisi istimewa menghalangi kaum miskin untuk mendapatkan kesempatan, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan keamanan, merupakan sumber ketidakadilan. Oleh karena itu, kalau kaum miskin ingin meninggalkan kemiskinannya, maka mereka harus berjuang melawan ketidakadilan yang bersumber dari orang-orang yang menempati posisi istimewa itu. Orang-orang itu adalah segelintir elite, baik di aras pusat maupun daerah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan.

Kaum miskin yang berjuang untuk memperbaiki taraf hidup bukanlah peminta-minta. Kalaupun mereka meminta bantuan kepada pemerintah, hal itu dikarenakan mereka memang berhak mendapatkannya. Sebab, negara ini didirikan antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Seluruh anak bangsa tanpa terkecuali berhak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan yang layak, dan kehidupan yang sejahtera. Pemerintah bertugas untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi seluruh rakyat dalam mencapai tujuan tersebut. Kaum miskin memang lemah, sehingga mereka perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari negara. Untuk itu, bantuan yang diharapkan dari pemerintah bukanlah sekedar bantuan pangan agar mereka dapat bertahan hidup, tetapi bantuan yang menyeluruh dalam upaya pemberdayaan kaum miskin.

Kalau kaum miskin menuntut perubahan struktur di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan keamanan, itu artinya mereka sedang menuntut keadilan. Karena kemiskinan yang terjadi terutama adalah kemiskinan struktural, yang disebabkan oleh struktur politik, sosial dan ekonomi yang bersifat eksploitatif. Struktur kemasyarakatan dan kenegaraan yang secara sengaja diciptakan bersifat eksploitatif menyebabkan sebagian besar golongan bawah memperoleh terlalu sedikit dari yang seharusnya. Ketidakadilan yang terjadi terlihat dalam bentuk ketimpangan antara pusat dan daerah, ketimpangan antara kota dan desa, dan ketimpangan antarsektor.

Pemberdayaan kaum miskin berarti juga upaya penegakan keadilan. Penegakan keadilan dalam semua aspek kehidupan adalah cara sekaligus tujuan dari upaya pemberdayaan kaum miskin. Pelecehan terhadap kaum miskin bertentangan dengan cita-cita demokrasi, keadilan, dan persaudaraan. Pelecehan ini merupakan paradoks dalam kehidupan bangsa Indonesia yang didirikan atas prinsip bahwa semua orang diciptakan sama. Menerima suatu struktur yang tidak adil secara pasrah berarti bekerja sama dengan struktur itu, dan dengan demikian kaum miskin menjadi sama jahatnya dengan si penindas. Menolak bekerja sama dengan si jahat merupakan kewajiban moral untuk mengingatkan mereka. Kaum miskin yang tertindas tak pernah boleh membiarkan hati nurani si penindas tidak bersuara.

Menerima ketidakadilan secara pasrah sama dengan mengatakan kepada si pelaku ketidakadilan bahwa tindakannya itu adalah benar. Ini merupakan satu cara untuk membiarkan hati nuraninya tertidur. Oleh karena itu, mengalah terhadap ketidakadilan, meskipun kerap kali merupakan jalan yang lebih mudah, bukanlah cara yang bermoral. Sikap mengalah ini dapat ditafsirkan sebagai bukti kerendahan martabat kaum miskin.

Meningkatkan Kesadaran

Kaum miskin diburu oleh kebutuhan yang terus mendesak, karena pendapatan mereka rendah, tidak punya tabungan, dan tidak punya jaminan sosial. Aksi yang satu berlanjut dengan “aksi” yang lain, tanpa sempat mengadakan “refleksi”. Oleh karena itu, kualitas kegiatan mereka tidak meningkat dari waktu ke waktu, sehingga “pengulangan kegagalan” menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Banyak juga kaum miskin yang kelebihan waktu, misalnya para penganggur. Tetapi, kurangnya pengetahuan dan cengkraman kemiskinan membuat mereka tidak mampu memanfaatkan waktu secara optimal. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa kaum miskin membutuhkan pendidikan politik agar mereka menyadari bahwa kemiskinan mereka juga diakibatkan oleh ketidakadilan struktural. Dengan meningkatkan partisipasi politik, kaum miskin dapat mempengaruhi keputusan politik agar sesuai dengan kepentingan mereka. Ketidakadilan struktural harus dihapus. Untuk tujuan ini, dibutuhkan partisipasi politik kaum miskin dengan cara yang benar dan pada waktu yang tepat.

Bagaimanapun kaum miskin paling berkepentingan dan bertanggungjawab untuk memperbaiki hidup mereka sendiri. Walaupun banyak pihak yang mau menolong, kaum miskin itu sendirilah yang harus berbuat lebih dahulu. Paling tidak mereka harus bisa menuntut perhatian dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, yang pertama kali harus dilaksanakan oleh siapa pun yang ingin ikut dalam proses pemberdayaan kaum miskin adalah menyadarkan kaum miskin tentang kondisi mereka sebagai warga negara; apa yang menjadi hak-hak mereka dan apa yang perlu mereka lakukan dalam rangka memperbaiki kehidupan mereka.

Ilmuwan politik terkemuka, Samuel P. Huntington (1994), mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh para warga negara biasa, dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa kaum miskin tidak banyak berpartisipasi dalam bidang politik, karena bagi mereka partisipasi politik tidak relevan dengan kepentingan mereka yang paling mendesak: pekerjaan, pangan, bantuan medis untuk hari ini, esok atau minggu depan.

Partisipasi politik kaum miskin yang rendah mengakibatkan pengaruh mereka pada proses pengambilan keputusan pemerintah juga rendah. Banyak keputusan pemerintah merugikan kaum miskin. Partisipasi politik kaum miskin yang rendah mengakibatkan pengembangan demokrasi juga terhambat.

Reformasi untuk menegakkan demokrasi harus terus digerakkan di semua lapisan dan di semua tingkatan agar demokrasi lebih cepat terwujud. Dalam gerakan reformasi nasional ini, kaum miskin harus diikutsertakan, sehingga kemajuan reformasi berdampak langsung pada kehidupan kaum miskin. Kaum miskin berjumlah banyak dan tersebar di seluruh Nusantara. Kelemahan mereka adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan berpolitik. Keberhasilan reformasi nasional merupakan tanggung jawab semua warganegara, termasuk kaum miskin. Keberhasilan reformasi dalam mewujudkan demokrasi akan menguntungkan semua pihak, termasuk meningkatkan taraf hidup kaum miskin.

Dengan peningkatan partisipasi politik kaum miskin, kebijakan pemerintah dapat didorong untuk lebih kondusif bagi pemberdayaan kaum miskin. Partisipasi politik kaum miskin yang meningkat akan menunjang upaya untuk meningkatkan pendidikan, pendapatan, peranan ekonomi dan keamanan kaum miskin. Peningkatan aktivitas politik ini membuat akses kaum miskin ke sumber daya politik juga meningkat. Pengaruh kaum miskin pada proses politik, khususnya yang menyangkut perbaikan pelayanan kepentingan mereka, akan lebih meningkat. Mereka dapat memperjuangkan aspirasi politik melalui saluran yang tepat dan dengan cara yang benar.

Carl Gersham berpendapat bahwa apabila demokrasi ingin berhasil dibangun di negara-negara sedang berkembang, maka harus ditemukan cara untuk membawa mereka yang tersingkir dan yang tercabut hak-haknya ke dalam proses ekonomi dan politik. Salah satu penyebab kegagalan demokrasi di negara sedang berkembang adalah banyaknya warganegara, terutama kaum miskin yang tidak ikut aktif dalam dunia politik. Partisipasi politik kaum miskin rendah, dan akibatnya hak-hak mereka banyak yang tidak mampu didapatkan. Kondisi seperti ini membuat hanya sebagian kecil saja dari warga negara yang berpengaruh dalam proses pemerintahan negara. Dan oleh karena itu, warganegara yang tersingkir dan tercabut hak-haknya itu harus dibawa masuk ke dalam proses ekonomi dan politik (lihat Larry Diamond, 1994).

Untuk membawa warganegara yang tersingkir dan tercabut hak-haknya ke dalam dunia politik seperti yang disebut oleh Gersham itu, organisasi-organisasi menengah dapat dimanfaatkan, seperti organisasi buruh, organisasi nelayan, dan organisasi petani dapat berperan aktif dalam mengikutsertakan kaum miskin dan kaum tersingkir lainnya dalam proses penciptaan opini publik. Mereka yang selama ini disebut sebagai “mayoritas diam” harus ikut berbicara tentang apa yang perlu dilaksanakan negara, tentang apa kebijakan pemerintah yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Ketimpangan pengaruh antara “minoritas vokal” dan “mayoritas diam” ini harus dikurangi sehingga gerak langkah negara disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Inilah hakikat demokrasi yang masih belum terwujud di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan kaum miskin adalah meningkatkan partisipasi politik kaum miskin, seperti partisipasi dalam memperjuangkan kepentingan kaum miskin, partisipasi pada pemilu, dan aktivitas politik lainnya. Kaum miskin dapat meningkatkan partisipasi politiknya kalau kesadaran politik mereka ditingkatkan. Tetapi, partisipasi politik jelas membutuhkan informasi politik. Penyampaian informasi politik kepada penduduk miskin dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik mereka, sekaligus untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan aktivitas politik.

Partisipasi politik kaum miskin juga harus didukung oleh pers yang bebas. Hanya pers yang bebaslah yang dapat menyuarakan aspirasi kaum miskin dengan jelas dan lugas. Aspirasi kaum miskin yang terus menerus disuarakan oleh media massa akan menjadi “alat pemaksa” bagi pemerintah agar lebih memperhatikan nasib kaum miskin. Oleh karena itu, kebebasan pers yang sudah ada sekarang harus terus dipelihara dan dimantapkan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah mendorong media massa, termasuk media massa lokal, agar lebih banyak meliput perjuangan kaum miskin.

Aspirasi politik kaum miskin harus diangkat ke tingkat lebih tinggi, sampai ke tingkat nasional. Kaum miskin perlu ikut aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik, baik sebagai anggota ataupun sebagai pengurus. Kehadiran kaum miskin yang aktif dalam partai politik akan menentukan pejabat-pejabat politik di semua tingkatan. Pejabat politik akan berusaha memperjuangkan kepentingan kaum miskin agar mereka mendapat dukungan politik dari kaum miskin. Kondisi seperti ini sebenarnya juga terjadi pada bidang kehidupan lain.

Pemberdayaan Kaum Miskin

Kaum miskin yang melawan ketidakadilan, yang selama ini telah menimpa mereka, haruslah berdaya. Kaum miskin yang berdaya akan berjuang demi meninggalkan kemiskinannya, secara bersama-sama atas

kesadaran dan kemauan bersama, untuk menjadi berdaya, kaum miskin harus meningkatkan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik, dan mempunyai akses ke berbagai sumber daya ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan keamanan.

Oleh karena itu, dalam upaya pemberdayaan ini, kaum miskin harus belajar dan berlatih meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Pada saat yang sama struktur dan prosedur politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lainnya, harus diubah sedemikian rupa agar kaum miskin, dengan bekerja keras mereka dan keluarganya dapat naik kembali untuk keluar dari kemiskinan. Sesungguhnya, kemiskinan bagi seseorang atau sekelompok orang hanyalah keadaan yang sementara saja, yang karena itu dapat ditinggalkan dengan cara belajar dan bekerja keras, dengan menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh negara. Artinya, kemiskinan struktural harus dihapus, dan walaupun ada orang miskin, penyebabnya berasal dari dalam diri mereka sendiri.

Dari hasil penelitian bertema “Kegiatan LSM Memberdayakan kaum Miskin di Jawa Tengah” yang dilaksanakan pada akhir 1996 dan awal 1997, saya mendapat kesimpulan sebagai berikut. Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan pada suatu kelompok swadaya masyarakat (KSM) akan memberikan hasil yang semakin baik apabila kegiatan tersebut meliputi bidang kehidupan yang semakin banyak. Suatu KSM yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan dalam bidang ekonomi, pendidikan, hukum, dan politik akan lebih cepat berdaya dibandingkan dengan KSM yang hanya mendapatkan kegiatan dalam satu bidang saja. Selanjutnya KSM yang mendapat kegiatan dalam satu bidang tertentu semisal ekonomi, dalam waktu dua tahun kegiatan ekonominya akan meningkat, tetapi kegiatan lain seperti politik tidak berubah (Merphin Panjaitan, 1997).

Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa kalau pembangunan ekonomi berhasil, maka pembangunan di bidang lainnya juga akan mengikutinya, dalam ukuran kecil, pada penelitian ini tidaklah terbukti. Saya menemukan KSM yang partisipasi politiknya tinggi adalah hasil KSM yang sejak awal mendapatkan pelatihan politik yang kemudian dilanjutkan dengan partisipasi politik. Beberapa KSM yang keberdayaannya meningkat pesat setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan dua tahun adalah KSM yang belajar dan melaksanakan kegiatan ekonomi, pendidikan, politik dan hukum secara bersamaan.

Beranjak dari penemuan di atas, saya menyarankan agar pemberdayaan kaum miskin dilaksanakan pada semua bidang kehidupan, berupa peningkatan kemampuan pribadi mereka dan perubahan sistem politik, ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan agar kaum miskin dapat memanfaatkannya. Oleh karena itulah kaum miskin perlu mendapatkan pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan peserta untuk ikut menciptakan tatanan masyarakat dan negara yang demokratis. Pada tahapan awal, perlu ditumbuhkan kesadaran peserta tentang prinsip dan produk demokrasi. Nilai-nilai ini diperkenalkan dan dihadapkan dengan kenyataan hidup sehari-hari, mulai dari tingkat lokal sampai dengan tingkat nasional. Misalnya, didiskusikan apakah selama ini mereka merasa diperlakukan sama dengan warga negara lainnya oleh pejabat pemerintah. Apakah mereka dapat menyampaikan pendapat dengan bebas di hadapan pemerintah dan di hadapan umum.

Diskusi tentang nilai-nilai demokrasi dan implementasinya akan menyadarkan peserta tentang apa yang seharusnya terjadi dan apa yang nyatanya terjadi. Tentunya akan terlihat kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang ternyata terjadi. Peserta akhirnya menyadari bahwa kesenjangan tersebut harus diperkecil, dan untuk itu masyarakat, termasuk kaum miskin, harus berjuang agar

kehidupan ini lebih demokratis dan lebih adil. Selanjutnya, kepada peserta diperkenalkan struktur pemerintahan dan bagaimana proses pemerintahan berlangsung. Mereka mendiskusikan apa makna pemilu dalam suatu negara demokrasi. Kepada peserta perlu dijelaskan bahwa pemilu adalah salah satu titik puncak dari kedaulatan rakyat. Selain itu perlu juga didiskusikan proses yang berlangsung sejak pemilu sampai dengan penentuan pejabat negara, dan selanjutnya bagaimana kebijakan pemerintah ditentukan. Misalnya, melalui pemilu terpilihlah anggota DPRD. Selanjutnya DPRD memilih bupati/walikota dan menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses pemilihan bupati/walikota seperti ini sebaiknya diubah. Akan lebih demokratis kalau gubernur, bupati, walikota, dan lurah langsung dipilih oleh rakyat.

Para peserta mendiskusikan hubungan antara berbagai pilihan pada waktu pemilu dan siapa yang akan menjadi pejabat pemerintah. Setelah itu mereka diharapkan dapat menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya. Mendiskusikan pemerintahan lokal seperti itu lebih mudah dimengerti dan akan lebih menarik karena dampaknya lebih mudah dilihat. Pelajaran selanjutnya meningkat pada upaya mempengaruhi penentuan kebijakan pemerintah agar lebih memihak kaum miskin. Kaum miskin perlu mengetahui cara-cara mempengaruhi lembaga-lembaga perwakilan, presiden, gubernur, bupati/walikota, sehingga aspirasi mereka diperhitungkan dalam menentukan kebijakan pemerintah. Cara-cara tersebut, antara lain, dapat dilakukan dengan mengirim usul tertulis kepada lembaga atau pejabat terkait, menyampaikan usulan secara lisan, unjuk rasa, dan mogok.

Pendidikan demokrasi seperti ini dapat dilaksanakan melalui pertemuan rutin satu atau dua kali seminggu, sesuai dengan waktu peserta. Selanjutnya, mereka dianjurkan untuk membuat kelompok, atau organisasi sesuai dengan kepentingan mereka, agar perjuangan mereka menjadi lebih kuat, lebih sistematis, dan berkelanjutan. Pada tahap awal, barangkali mereka akan memerlukan pendampingan. Tapi selanjutnya, mereka harus diberi kesempatan untuk dapat mengelola organisasinya sendiri.

Undang-undang Pemberdayaan Kaum Miskin

Kaum miskin membutuhkan pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang optimal, lapangan kerja dan modal kerja. Petani harus mampu memiliki atau menyewa lahan, nelayan perlu memiliki atau menyewa peralatan penangkapan ikan. Sopir bemo, oplet, bajaj, dan taksi perlu memiliki kendaraan angkutan sendiri agar pendapatannya dapat meningkat dan lebih bertanggungjawab terhadap kenyamanan dan keselamatan penumpang. Untuk mewujudkan kebijakan di atas, perlu disiapkan sebuah bank pemerintah yang khusus memberikan pinjaman kepada kaum miskin. Dengan demikian, mereka dapat memiliki modal kerja sendiri sesuai dengan profesinya dan terhindar dari perangkap rentenir. Pinjaman tanpa agunan juga perlu diberikan kepada pemerintah desa untuk membiayai Lumbung Desa yang akan menampung, menyimpan, dan mendistribusikan hasil panen di desa mereka masing-masing.

Program pemberdayaan kaum miskin ini dananya diambil dari anggaran subsidi BBM. Subsidi BBM dihapus, dan dananya dibagikan kepada kaum miskin di seluruh Indonesia. Dana bantuan untuk kaum miskin ini, antara lain, digunakan untuk membeli bahan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan biaya transportasi. Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, perlu diwujudkan keadilan sosial secara merata bagi semua warganegara. Yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan.

Privatisasi BUMN yang berlangsung pada tahun 2002 membuat banyak saham BUMN pindah ke tangan perusahaan asing. Hal ini membuat banyak pihak mengkhawatirkannya. Saham-saham BUMN yang sekarang ini berada di tangan pemerintah pusat, sebaiknya secara bertahap dijual kepada pemerintah daerah dan koperasi karyawan perusahaan tersebut. Pemerintah daerah dan koperasi karyawan dapat menggunakan pinjaman dari berbagai bank di dalam negeri untuk membeli saham BUMN, khususnya BUMN yang berlokasi di daerahnya. Dengan demikian, selain pemerintah mendapat dana untuk APBN, juga terjadi pemerataan di bidang ekonomi.

Untuk melaksanakan kebijakan di atas perlu dibuat Undang-Undang Pemberdayaan Kaum Miskin, dan dilanjutkan dengan pembuatan Perda terkait di daerah-daerah. Selanjutnya, untuk memberikan jaminan agar semua pendidik Indonesia dapat menerima pelayanan kesehatan yang optimal, perlu dibentuk asuransi kesehatan nasional. Semua penduduk Indonesia diwajibkan menjadi peserta asuransi kesehatan, dan bagi orang-orang miskin, premi asuransinya dibayar oleh negara melalui APBN. Semua penduduk Indonesia, termasuk kaum miskin, harus mempunyai akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di atas perlu dibuat Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional.

Perlindungan terhadap Petani

Sekitar 50 persen dari tenaga kerja Indonesia hidup di sektor pertanian. Pada saat krisis ekonomi terjadi, sektor pertanian tampil sebagai salah satu kekuatan penyangga ekonomi Indonesia. Tetapi, sejak Orde Baru sampai sekarang ini, petani seringkali dirugikan oleh kebijakan pemerintah yang lebih memihak sektor industri dan jasa. Kebijakan seperti ini tidak adil dan harus diubah. Secara umum, sektor pertanian perlu dibantu dan dilindungi, antara lain dengan memberikan bantuan keahlian, kemudahan mendapatkan pinjaman, perluasan pasar dan pengenaan bea masuk yang tinggi terhadap komoditi pertanian tertentu. Saya usulkan bea masuk untuk gula, beras dan kacang kedelai sebesar Rp 2000 per kilo, agar pendapatan petani padi, tebu, dan kacang kedelai meningkat. Dengan demikian mereka menjadi sejahtera dan bersedia terus menanam padi, tebu, dan kacang kedelai, sehingga produksi beras, gula, dan kacang kedelai terus meningkat.

Selama ini terjadi ketidakadilan dalam pengelolaan atau pemanfaatan tanah dan sumber daya alam (SDA) yang mengakibatkan segelintir pengusaha dan pejabat pemerintah yang terkait menjadi kaya-raya, sementara sebagian besar penduduk tetap miskin, karena tidak punya akses pada tanah dan SDA. Dalam upaya menegakkan keadilan, diperlukan kebijakan pertanahan dan SDA yang memihak pada kepentingan masyarakat luas, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Harus diatur sedemikian rupa, agar petani mendapat lahan, penduduk di sekitar hutan memiliki HPH, tambang tradisional diusahakan oleh penambang tradisional yang tergabung dalam koperasi, petambak ikan mempunyai tambak, peternak mempunyai ternak, dan lahan penggembalaan, dan seterusnya. Karena itulah kebijakan pertanahan dan SDA juga harus demokratis dan adil. Untuk itu perlu dibuat Undang-Undang Pertanahan dan Sumber Daya Alam,

Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah

Dalam upaya memperbesar akses kaum miskin terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pemantapan otonomi daerah dan pemekaran wilayah.

Otonomi daerah yang telah dimulai pada Januari 2001 telah memberikan kehidupan yang lebih demokratis di tingkat daerah. Tuntutan masyarakat untuk pemekaran wilayah telah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih demokratis. Otonomi daerah ini perlu dimantapkan dan pemekaran wilayah dilanjutkan hingga jumlah penduduk dan luas wilayah pada setiap daerah otonom tidak terlalu besar. Dengan demikian, komunikasi antara unit pemerintahan daerah dan masyarakat di daerahnya dapat lebih lancar dan lebih cepat.

Selanjutnya, hal itu dapat membuat kendali masyarakat termasuk kaum miskin dalam proses pemerintahan daerah menjadi cukup kuat, dan pelayanan publik oleh pemerintah daerah menjadi lebih baik. Apabila masyarakat di suatu daerah sudah sepakat untuk mengurus diri sendiri dengan potensi daerah yang tersedia untuk kesejahteraan rakyatnya, maka seyogyanya daerah tersebut dijadikan daerah otonom. Pemantapan otonomi daerah dan pemekaran wilayah bertujuan untuk mendekatkan kekuasaan negara kepada masyarakat, dalam rangka memantapkan demokrasi.

Saya memperkirakan sampai dengan tahun 2010, jumlah provinsi akan meningkat menjadi sekitar 100, dan jumlah kota/kabupaten meningkat menjadi sekitar 2000. Sumatera menjadi sekitar 25 provinsi dan 500 kabupaten/kota, Jawa menjadi sekitar 30 provinsi dan 800 kabupaten/kota. Kalimantan menjadi sekitar 15 provinsi dan 200 kabupaten/kota. Sulawesi menjadi sekitar 15 provinsi dan 200 kabupaten/kota. Papua menjadi sekitar 5 provinsi dan 100 kabupaten/kota. Otonomi khusus untuk Papua tidak lagi diberikan kepada Provinsi Papua, tetapi kepada wilayah Papua. Daerah terpencil ditingkatkan statusnya. Nias, Madura, Buton, Sangihe Talaud, Maluku Tenggara, dan Puncak Jayawijaya dijadikan provinsi. Karimun Jawa di utara Jawa Tengah dijadikan kabupaten. Struktur pemerintahan daerah diubah, kecamatan dihapus, dan otonomi diberikan kepada pemerintahan provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan. Pemerintah daerah yang lebih tinggi mensupervisi dan koordinasi pemerintahan daerah yang lebih rendah.

Aktif dalam Pemilu

Partisipasi masyarakat pada pemilu di Indonesia cukup tinggi. Akan tetapi, partisipasi yang banyak terjadi selama Orde Baru adalah partisipasi yang dimobilisasi. Rezim Orde Baru sejak awal telah menentukan “target pemilu” dan hampir semua cara boleh dilaksanakan untuk mencapai target tersebut.

Pemilu 1999 sudah lebih bebas dan adil. Para pemilih bebas menentukan pilihan mereka. Yang masih kurang pada pemilu 1999 adalah pengetahuan pemilih tentang hubungan antara pemilu dengan upaya perbaikan taraf hidup. Pemilu hanya memperhatikan tokoh-tokoh partai di tingkat nasional. Program yang ditawarkan oleh partai politik belum diperhatikan, demikian pula dengan calon anggota legislatif. Akibatnya masyarakat kurang berhasil memanfaatkan pemilu untuk menentukan pejabat negara dan kebijakan pemerintah yang memihak pada kepentingan masyarakat luas, terutama kaum miskin.

Kondisi seperti ini harus diubah, dan untuk itu para pemilih sejak awal harus mengetahui bagaimana memanfaatkan pemilu untuk memilih pejabat negara yang dapat diharapkan membela kepentingan kaum miskin. Pemilihan Umum sebaiknya dapat menjadi Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal agar tokoh dan isu lokal tidak tertutup oleh tokoh dan isu nasional. Pemilu Nasional dilaksanakan setiap 5 tahun, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan anggota DPD. Anggota DPR dipilih dengan sistem distrik banyak wakil (*multi member district system*), sedangkan anggota DPD yang jumlahnya sama untuk setiap provinsi dipilih langsung secara perorangan. Pemilu Lokal dilaksanakan

setiap 3 tahun untuk memilih secara langsung Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Kepala Desa/Lurah, anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Pencalonan untuk semua jabatan politik di atas, selain dilakukan oleh partai politik, dapat juga dilakukan oleh perorangan.

Mengawasi Pemerintah

Pemerintah tidak akan berubah menjadi baik dari dalam dirinya sendiri, karena pemerintah tidak banyak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Pemerintah hanya menduga-duga kebutuhan masyarakat, dan bersamaan dengan itu mereka juga mempunyai kepentingan pribadi yang tidak mudah terpuaskan. Kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok biasanya lebih mudah diingat para pejabat pemerintah. Selain itu perlu selalu diingat bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Di negara demokrasi, rakyat harus dapat “memaksa” pemerintah untuk melayani mereka sesuai dengan kepentingan rakyat. Itulah sebabnya masyarakat, termasuk kaum miskin harus mengawasi pemerintah dan selalu mengingatkan tentang apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan apa yang tidak perlu.

Di era Order Baru, kita melihat bahwa pemerintah pusat dan daerah banyak menjalankan program yang ditolak oleh masyarakat, dan pada saat yang sama tidak bersedia melaksanakan tuntutan rakyat. Kalau proses demokrasi berjalan, rezim Order Baru mestinya telah lama tumbang. Akan tetapi, pada waktu itu mereka terlalu kuat dan dapat memaksakan kehendaknya terhadap masyarakat yang lemah. Tindakan pengusuran, misalnya, adalah salah satu “kesukaan” rezim Orde Baru yang terus berlanjut sampai sekarang. Masyarakat membutuhkan dialog, tetapi pemerintah sering “menjawab dengan pengusuran”. Kondisi ini jelas harus dihentikan.

Masyarakat harus terus menerus mengawasi pemerintah agar mereka selalu “ingat” kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Kalau pemerintah lupa, sebaiknya rakyat juga melupakan mereka. Kita perlu ingat, kaum miskin menjadi pihak paling menderita akibat krisis ekonomi yang terjadi karena kegagalan pemerintah. Kenyataan ini mengingatkan kita semua, termasuk kaum miskin, untuk selalu mengawasi pemerintah dan kalau perlu memarahi mereka atau memberhentikannya, agar mereka selalu bertindak sesuai kehendak rakyat. Dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, birokrasi pemerintah perlu diperbaiki.

Birokrasi pemerintah selama ini lamban dan kurang melayani masyarakat. Mereka seringkali bersikap seperti pemilik jabatan yang ada pada mereka. Mereka lupa bahwa jabatan yang dipercayakan kepada mereka itu adalah berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk melayani rakyat. Kekeliruan ini harus dikoreksi dengan mengadakan reformasi birokrasi pemerintah, antara lain:

1. Semua pegawai negeri harus mempunyai jabatan fungsional dan harus mengembangkan kemampuannya sesuai dengan fungsinya.
2. Jabatan struktural dikurangi.
3. Gaji pegawai negeri ditingkatkan secara bertahap, sesuai dengan prestasi birokrasi pemerintah secara keseluruhan. Kenaikan gaji pegawai negeri tergantung pada peningkatan penerimaan dalam negeri. Peningkatan penerimaan dalam negeri tergantung pada perkembangan perekonomian masyarakat. Artinya, kalau kita menghendaki gaji pegawai negeri ditingkatkan, maka birokrasi pemerintah harus mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Ini berarti korupsi harus dihentikan.

Korupsi menjadi salah satu sebab utama kemiskinan struktural. Korupsi telah menjadi penyakit masyarakat kita yang hampir mustahil dihilangkan. Korupsi membuat tambahan kesulitan dalam kehidupan masyarakat yang sudah sangat berat ini. Oleh karena itu korupsi harus diberantas. Koruptor harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Hakim dan jaksa, yang diduga terlibat korupsi, tidak diperbolehkan menjalankan tugasnya. Mereka dirumahkan saja, lalu digantikan dengan hakim dan jaksa yang baru. Sekaitan itu, pendapatan hakim dan jaksa harus ditingkatkan sesuai dengan prestasi kerjanya, khususnya dalam memberantas korupsi.

Dialog dan Unjuk Rasa

Negara demokrasi adalah negara yang dikelola dengan dialog dan pengambilan suara. Di Indonesia, demokrasi banyak diwarnai oleh unjuk rasa, karena dialog sering mengalami kegagalan dalam mengambil keputusan yang dikehendaki rakyat. Bahkan pemilu 1997 pun dapat dikatakan gagal dan perlu “diulang” dengan pemilu 1999. Soeharto turun dari jabatan presiden karena tekanan unjuk rasa mahasiswa. Sejak jauh hari, rakyat sebenarnya sudah tidak menghendaki Soeharto menjadi presiden lagi, tetapi MPR gagal melaksanakan keinginan rakyat ini. Tugas MPR akhirnya “diambilalih mahasiswa” dengan cara mengadakan unjuk rasa besar-besaran yang dilaksanakan hampir di semua kota besar di Indonesia. Akibatnya dan akhirnya, Presiden Soeharto pun turun dari tahta yang telah didudukinya selama 32 tahun.

Belajar dari pengalaman ini, agaknya kaum miskin perlu juga menggunakan unjuk rasa dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Misalnya, masyarakat di sekitar hutan yang hidup dari hasil hutan mengadakan unjuk rasa besar-besaran menuntut agar HPH dari hutan di sekitar tempat tinggal mereka dapat mereka miliki. Selain itu, pemerintah dituntut melatih dan memberi bantuan modal kepada kaum miskin di sekitar hutan.

Petani padi menuntut agar bea masuk beras dinaikkan, demikian pula petani tebu mengadakan unjuk rasa menuntut kenaikan bea gula impor. Nelayan mengadakan unjuk rasa besar-besaran menuntut pemerintah agar membantu mereka untuk memiliki kapal penangkap ikan, dan sebagian besar saham perusahaan pelelangan ikan dapat dibeli koperasi nelayan. Unjuk rasa ini tentunya bukan cara yang pertama, tetapi dapat ditempuh setelah upaya dialog ditolak oleh pemerintah. Walaupun unjuk rasa sering memberikan hasil, pada masa yang akan datang masyarakat harus selalu berusaha mencapai kesepakatan tentang berbagai permasalahan bangsa dengan cara dialog. Unjuk rasa dijadikan pilihan terakhir setelah dialog dan cara lainnya gagal. Tapi, harus diingat, unjuk rasa pun haruslah dilaksanakan secara damai, tanpa kekerasan dan tanpa perusakan.

Mogok Kerja

Kenyataan memperlihatkan bahwa banyak buruh dari perusahaan yang berkembang pesat tetap mendapat gaji rendah. Akibatnya banyak buruh kasar yang tetap miskin, walaupun keuntungan perusahaan tempatnya bekerja itu kian bertambah. Kenyataan ini tentunya tidak adil dan harus dikoreksi. Setiap orang harus mendapat bagian sesuai dengan prestasinya.

Buruh adalah kekuatan utama perusahaan yang banyak menentukan keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, buruh harus mendapat upah yang sesuai dengan prestasinya. Selama Orde Baru, di bawah cengkraman struktur yang eksploitatif, buruh mendapat kurang dari apa yang semestinya mereka dapatkan. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme mengambil sebagian pendapatan mereka. Kondisi ini

harus dihentikan, dan buruh harus siap mengadakan mogok kerja sebagai kelanjutan dari kegagalan dialog dengan pengusaha dan pemerintah. Buruh harus dapat mempengaruhi pemerintah agar berlaku adil. Pejabat pemerintah harus lepas dari kendali pengusaha dan menjadi pejabat yang melayani semua. Tujuan mogok kerja adalah untuk memperlancar dialog yang sering dihambat oleh pengusaha demi kepentingan mereka sendiri. Mogok kerja dilaksanakan dalam suasana damai tanpa kekerasan dan tanpa perusakan.

Peranan lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah berperan aktif sejak lama dalam pemberdayaan kaum miskin. Pada masa Orde Baru, LSM dengan suaranya yang lantang mendampingi kaum miskin melalui berbagai kegiatan karitatif, pengembangan masyarakat dan advokasi. Dalam membela kaum miskin, yang menghadapi ancaman penggusuran, LSM mendampingi mereka menghadapi aparat pemerintah daerah yang membawa bulldoser. Pembangunan sering dilakukan dengan menggusur kaum miskin yang berjuang membela hak-haknya, tetapi hampir selalu kalah. Orde Baru memang lebih berpihak kepada yang kuat, sementara yang lemah hampir selalu kalah, walaupun mereka benar.

Banyak LSM yang mendampingi kaum miskin dan melihat dengan jelas perlakuan pemerintah yang tidak adil. Pada era reformasi kita melihat peluang bagi upaya pemberdayaan kaum miskin sebagai bagian dari upaya penegakan keadilan dan demokrasi. LSM dapat berperan dalam meningkatkan keterampilan berpolitik. Langkah strategis yang perlu ditempuh LSM adalah pendidikan kader penggerak masyarakat.

Kader-kader yang akan disiapkan antara lain:

1. Kader untuk memimpin organisasi, baik organisasi kepentingan maupun partai politik;
2. Kader untuk membentuk dan mengelola kelompok-kelompok usaha;
3. Kader untuk menggerakkan unjuk rasa dan mogok kerja
4. Kader untuk berdialog dengan pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait.

Keberhasilan LSM dalam memberdayakan kaum miskin akhirnya banyak ditentukan oleh keberhasilan mereka mendampingi kaum miskin dalam konteks partisipasi politik. Pendampingan yang baik akan membuat kaum miskin lebih cepat maju dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka.

Partai Politik Kurang Berperan

Sampai sekarang, peranan partai politik dalam pemberdayaan kaum miskin masih terasa kecil. Pada waktu kampanye pemilu, hampir semua partai politik menjanjikan program untuk kaum miskin. Akan tetapi, segera setelah pemilu selesai, janji itu seringkali tertutup oleh isu-isu politik lainnya. Sebagai contoh, pada Pemilu 1999, banyak partai politik menjanjikan perluasan kesempatan kerja. Namun, sampai sekarang kita belum melihat program pemerintah yang cukup kuat dalam perluasan lapangan kerja. Yang terjadi sekarang justru semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengangguran berarti kemiskinan, dan kemiskinan yang semakin luas dan parah dapat membuat masyarakat mencari "jalan lain". Kalau pengangguran dan kemiskinan berjalan terus dan semakin parah, integrasi nasional dapat terancam. Kesetiaan masyarakat kepada negara Republik Indonesia akan berkurang, dan mereka bisa berpindah pada kesetiaan yang lain, partai politik harus segera berbuat banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat luas, misalnya perluasan lapangan kerja dan penegakan

keadilan. Melalui fungsi rekrutmen politik, partai politik dapat mempersiapkan sebagian dari kaum miskin untuk menjadi pengurus partai dan pejabat politik. Kader partai politik yang berasal dari kaum miskin dapat dicalonkan menjadi anggota DPRD.

DPRD yang anggotanya sebagian adalah pejuang kaum miskin niscaya lebih berperan dalam proses pemberdayaan kaum miskin. Kesediaan partai politik untuk mendidik dan mencalonkan tokoh kaum miskin menjadi wakil rakyat seperti ini akan meningkatkan rasa percaya diri kaum miskin. Rasa percaya diri ini akan membuat mereka lebih bersemangat. Semboyan yang berbunyi “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama”, akan menjadi lebih mudah dimengerti.

Persoalannya sekarang adalah, partai politik mana yang akan berjuang sungguh-sungguh untuk kaum miskin, kalau kaum miskin itu sendiri belum dapat “menunjukkan” kekuatannya? Oleh karena itu kaum miskin harus lebih dahulu menunjukkan kekuatan mereka, agar perhatian partai politik terhadap perbaikan nasib kaum miskin dapat tumbuh. Atau kalau perlu kaum miskin itu sendiri dapat membuat partai politik yang khusus untuk memperjuangkan kepentingan sesama kaum miskin.

Penutup

Hidup dalam keadaan miskin sesungguhnya bukanlah hal yang aneh. Orang miskin ada di mana-mana, di seluruh dunia ini. Tetapi, puluhan juta orang di Indonesia menjadi miskin karena terperangkap dalam kemiskinan struktural. Yaitu, kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur politik, ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan yang tidak adil. Hal ini mestinya tidak perlu terjadi. Negara yang seharusnya membantu masyarakat menjadi maju dan sejahtera, justru berbuat sebaliknya. Negara yang seharusnya menegakkan keadilan justru berbuat tidak adil. Ini jelas harus dilawan, baik untuk kepentingan kaum miskin itu sendiri maupun untuk kemajuan negara secara keseluruhan.

Selamat berjuang, semoga berhasil.

Kepustakaan

Adler-Karlsson, Gunnar, 1996, *Kebijakan Untuk Menghapus Kemiskinan di Masa Depan*, dalam Andre Bayo Ala, (ed.) 1996. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Ala, Andre Bayo (ed.), 1996, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty

Diamond, Larry, (ed.), 1994, *Revolusi Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Friedman, John, *Kemiskinan Urban di Amerika Latin*, dalam Andre Bayo Ala (ed.), 1996, *Kemiskinan dan Strategi memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Huntington, Samuel P., 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta

Kuntjoro Jakti, Dorodjatun (ed.), 1994, *Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Panjaitan, Merphin, 1997, *Kegiatan LSM Memberdayakan Kaum Miskin dalam Perspektif Ketahanan Nasional: Studi kasis Jawa Tengah*, tesis magister, tidak diterbitkan.

_____, 1999, *Memberdayakan kaum Miskin*, Jakarta: BPK Gunung Mulia

_____, 2001, *Gerakan Warganegara Menuju Demokrasi*, Jakarta: Penerbit Restu Agung

Suparlan, Parsudi, (ed.), 1995 *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.